

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peneliti Terdahulu

Adapun penelitian yang sudah dilakukan beberapa peneliti terdahulu sebagai bahan referensi permbuatan penelitian ini, sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Peneliti, tahun	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas Pada Rumah Sakit Gunung Maria Di Tomohon, Pakadang, Desi, 2013	sistem, prosedur, pengendalian intern dan penerimaan kas	Kualitatif	Sistem Pengendalian Intern penerimaan kas Rumah Sakit Gunung Maria telah memadai sesuai dengan unsur-unsur sistem pengendalian intern kecuali untuk penilaian resiko dan pemantauan masih perlu di perhatikan.
2	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Untuk Persediaan Barang Dagangan Pada Cv. Multi Media Persada Manado Makisurat, Aprilia, Morasa, Jenny, Elim, Inggriani, 2014	evaluasi, sistem pengendalian intern, persediaan	Deskriptif kualitatif	<ol style="list-style-type: none">1. Sistem informasi akuntansi atas prosedur penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang dagangan sudah efektif2. CV. Multi Media Persada Manado memiliki sistem informasi yang baik, karena setiap pencatatan transaksi pencatatan transaksi

Dilanjutan

Lanjutan

				terkomputerisasi sehingga proses pengolahan datanya lebih cepat dan tingkat akurasi tinggi.
3	Kajian:Fraud (Kecurangan) Faktor-Faktor terjadi Fraud Putri, Anisa, 2012	Kecurangan	Kualitatif	Fraudulent merupakan salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Pelaku fraud bisa dari orang dalam perusahaan juga bisa dari luar perusahaan. Pemicu fraud antara lain disebabkan dari Faktor internal dan eksternal, faktor internal berasal dari diri individu yaitu :keserakahan, kebutuhan, tekanan, kesempatan dan rasional. Dan faktor eksternal yaitu Lemahnya Pengendalian Internal perusahaan
4	Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Piutang Pada Pt Nusantara Surya Sakti, Hamel, Gary, 2013	Pengendalian Intern, Piutang Usaha	Deskriptif	Dari kelima komponen sistem pengendalian internal, terdapat dua komponen sistem pengendalian internal yang kurang efektif yaitu dari lingkungan pengendalian dan aktivitas pengendalian

Dilanjutkan

Lanjutan

5	Evaluasi sistem pengendalian Internal menggunakan pendekatan COSO Pasca Temuan Audit (Study Kasus Koperasi Warga Gatra V), Susanti, Dyna lusi, 2016	Pengendalian Internal, COSO, Fraud, Siklus Simpan Pinjam, Spesial Audit	Deskriptif kualitatif	Beberapa prinsip pengenalian COSO yang belum terpenuhi dalam sistem pengendalian internal Koperasi Gatra V Seperti : Lingkungan pengendalian belum adanya kode etik yang tertulis yang dapat dijadikan pedoman integritas dan perilaku etis dalam koperasi Gatra V, Tidak ada evaluasi kompetensi secara berkala, koperasi gatra V belum memiliki target keuangan yang realistis, Penilaian Resiko belum mengevaluasi secara berkala atas ketentuan bunga dan pinjaman, belum terdapat personal atau kelompok yang memiliki tanggungjawab unttuk mengantisipasi perubahan eksternal dan internal yang berdampak signifikan.
---	---	---	-----------------------	--

Perbedaan dan Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, dari penelitian Desi (2013) adalah peneliti terdahulu berfokus pada pengevaluasian penerapan sistem pengendalian internal penerimaan kas dengan objek penelitian Rumah sakit Gunung Maria. Sedangkan pada penelitian Makisurat, Aprilia, Morasa, Jenny, Elim, Inggriani (2014) para peneliti memfokuskan penelitiannya pada penerapan sistem pengendalian internal untuk persediaan barang dagangan. Pada penelitian Putri, anisa (2012) terdapat persamaan dalam mengaitkan kecurangan dengan Faktor-faktor

pemicu kecurangan yaitu salah satunya lemahnya sistem pengendalian internal suatu organisasi terhadap tanggungjawab sumber daya manusianya yang menyebabkan tidak terpetanya tanggungjawab sehingga memberi celah terjadi kecurangan.

Pada penelitian Hamel, Gary (2013) juga terdapat perbedaan fokus yaitu pada Hamel, Gary berfokus pada evaluasi sistem pengendalian internal terhadap piutang Entitas dimana memiliki kesimpulan terdapat dua komponen sistem pengendalian internal yang kurang efektif yaitu dari lingkungan pengendalian dan aktivitas Pengendalian kurangnya tenaga yang kompeten dalam bidangnya dan perusahaan tidak memiliki prosedur atas kerugian piutang yang melebihi nilai materil

Pada penelitian Susanti, Dyna lusi (2016) yang berjudul Evaluasi sistem pengendalian Internal menggunakan pendekatan COSO Study KasusKoperasi Warga Gatra V, terdapat persamaan yaitu menghubungkan sistem pengendalian internal entitas terhadap tanggungjawab para pengurus dan pengelola koperasi dalam memperbaiki pengendalian pasca terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pengelola , perbedaanya adalah terdapat prespektif audit sistem pengendalian dalam penelitian ini, namun pada penelitian sekarang hanya dari sudut pandang penerapan sistem pengendalian internal entitas mampu meminimalisir kecurangan. Dari jurnal penelitian terdahulu yang digunakan referensi penelitian sekarang memiliki kesamaan dalam pembahasan sistem pengendalin internal entitas.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Koperasi

Pengertian koperasi menurut Undang-undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 yaitu “badan hukum yang didirikan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi”. Koperasi merupakan sebuah perusahaan yang harus mampu berdiri sendiri menjalankan kegiatan usahanya untuk memperoleh laba. Hanya saja perkoperasian di Indonesia tidak mengenal istilah “laba”, karena tujuan kegiatan koperasi tidak berorientasi pada laba (non-profit oriented) melainkan berorientasi pada manfaat (benefit oriented) (Wahyudin, agus, dkk, 2014).

Pada dasarnya koperasi dikelola dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat secara keseluruhan. Sekalipun koperasi tidak mengutamakan keuntungan, usaha-usaha yang dikelola oleh koperasi harus memperoleh SHU yang layak sehingga koperasi dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan meningkatkan kemampuan usahanya. (Wahyudin, agus, dkk, 2014).

2.2.1.1 Tujuan Koperasi

Menurut Titik S. Partomo (2013) tujuan perusahaan koperasi, antara lain sebagai berikut.

- a. Mempertahankan, jika mungkin meningkatkan bagian pasar dari satu (beberapa) barang dan jasa, dan menekan serendah-rendahnya biaya produksi, yang harus lebih rendah atau sekurang-kurangnya sama dengan biaya produksi para pesaingnya.
- b. Melindungi potensi ekonomisnya, menjaga atau mengamankan likuiditasnya, dan menciptakan inovasi.

2.2.1.2 Fungsi Koperasi

Fungsi koperasi menurut (Baswir, 2013) mempunyai dua fungsi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yaitu sebagai berikut.

- a. Fungsi koperasi dalam bidang ekonomi antara lain dalam berusaha koperasi lebih berperikemanusiaan artinya tidak semata-mata mencari keuntungan, pembagian (SHU) lebih adil sesuai dengan jasa anggota terhadap koperasi, koperasi bukan perkumpulan modal, jadi koperasi harus menghindari praktek monopoli, dengan motif pelayanan pada anggota.
- b. Fungsi koperasi dalam bidang sosial antara lain adalah melatih dan mendidik anggotanya untuk membiasakan diri hidup bekerja sama, memiliki semangat berkorban, membangun tatanan sosial yang berdasarkan rasa persaudaraan, kekeluargaan dan demokratis yang akhirnya dalam masyarakat akan tercipta kehidupan tentram

Ada bermacam-macam bentuk atau jenis koperasi. Menurut Nomor 25 Tahun 1992, ada dua bentuk koperasi, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder.

- a. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang. Orang-seorang pembentuk koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyai kepentingan ekonomi yang sama. Koperasi primer dibentuk oleh sekurangkurangnya 20 orang. Persyaratan ini dimaksud untuk menjaga kelayakan usaha dan kehidupan koperasi.
- b. Sekunder Berdasarkan status keanggotaan, koperasi sekunder terdiri atas dua macam koperasi yang beranggotakan sebagai berikut:
 - a) Badan hukum koperasi primer Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi Primer. Koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi primer disebut pusat koperasi primer.
 - b) Badan hukum koperasi sekunder Koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi sekunder disebut induk koperasi.

Menurut Arita (2009) menjelaskan bahwa koperasi juga dapat dibedakan berdasarkan kepentingan anggotanya. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Koperasi Konsumsi adalah jenis koperasi konsumen. Anggota koperasi konsumsi memperoleh barang dan jasa dengan harga lebih murah, lebih mudah, lebih baik dan dengan pelayanan yang menyenangkan.
- b. Koperasi Produksi disebut juga koperasi pemasaran. Koperasi produksi didirikan oleh anggota yang bekerja di sektor usaha produksi seperti petani, peternak, pengerajin, dan sebagainya.

- c. Koperasi jasa didirikan bagi calon anggota yang menjual jasa. Misalnya, usaha distribusi, usaha perhotelan, angkutan, restoran, dan lain-lain.
- d. Koperasi Simpan Pinjam didirikan untuk mendukung kepentingan anggota yang membutuhkan tambahan modal usaha dan kebutuhan finansial lainnya.
- e. Koperasi Single Purpose adalah koperasi yang aktivitasnya terdiri dari satu macam usaha. Misalnya, koperasi bahan kebutuhan pokok, alat-alat pertanian, koperasi simpan pinjam dan lain-lain. Sedangkan koperasi Multi Purpose adalah koperasi yang didirikan oleh para anggotanya untuk dua atau lebih jenis usaha.

2.2.2 Sistem Pengendalian Internal

2.2.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Pengertian pengendalian internal menurut COSO (2013) adalah :

“Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance.”

Dengan kata lain pengendalian internal adalah proses, yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan personel lain dalam perusahaan, yang dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai atas pencapaian tujuan operasi, pelaporan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Pengertian pengendalian internal menurut COSO senada dengan definisi yang dinyatakan oleh Ikatan Akuntansi

Indonesia (IAI) dan American Institute Certified of Public Accountans (AICPA), yaitu sama menyebutkan bahwa pengendalian internal merupakan sebuah proses yang dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai atas kehandalan laporan keuangan, operasional yang efisien dan ketaatan pada peraturan yang berlaku. Hanya saja AICPA menambahkan tujuannya dengan pengamanan aset

2.2.2.2 Tujuan Pengendalian Internal

Memperhatikan tujuan pengendalian internal yang ada dalam definisi pengertian pengendalian internal di awal dan perbandingannya dengan definisi dari berbagai pihak, maka dapat kita rangkumkan bahwa tujuan pengendalian internal adalah:

1. Kehandalan laporan keuangan
2. Meningkatkan efektivitas operasi
3. Ketaatan kepada hukum dan peraturan yang berlaku
4. Pengamanan aset.

2.2.2.3 Komponen Sistem Pengendalian Internal

Dalam suatu sistem pengendalian internal yang efektif menurut COSO (2013), harus memenuhi lima komponen utama yang saling berkaitan, Lima komponen pengendalian internal tersebut adalah

Tabel 2.2. Komponen Pengendalian Internal

Lingkungan Pengendalian (Control Environment)	Adalah seperangkat standar, proses, dan struktur yang menjadi dasar pengendalian internal di seluruh organisasi. Direksi dan manajemen menetapkan kebijakan yang jelas terkait pentingnya pengendalian internal dan perilaku standar yang diharapkan. Lingkungan pengendalian adalah cermin sikap dan
--	---

Lanjutan

Dilanjutkan

	tindakan pemilik & manajemen, sehingga menjadi fondasi dari semua komponen pengendalian internal lainnya. Atmosfer yang tercipta dari lingkungan pengendalian sangat mempengaruhi efektivitas komponen pengendalian internal secara keseluruhan.
Penilaian Risiko (Risk Assessment)	Adalah proses yang dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko dalam mencapai tujuan entitas serta menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Dalam konteks ini, tidak terbatas risiko laporan keuangan yang tidak handal, melainkan juga mempertimbangkan kemungkinan perubahan dalam lingkungan eksternal dan internal.
Aktivitas Pengendalian (Control Activities)	adalah tindakan yang diatur oleh kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan bahwa arahan organisasi untuk mengurangi risiko yang mempengaruhi pencapaian tujuan telah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian dilakukan di semua tingkat dan di berbagai tahap dalam proses bisnis dan pelaporan keuangan. Contoh aktivitas pengendalian adalah otorisasi, persetujuan, verifikasi, rekonsiliasi, reuiu, pemisahan tugas dan tanggung jawab
Komunikasi (Information and Communication)	pengendalian internal dalam mendukung pencapaian tujuan pelaporan keuangan. Komunikasi adalah kegiatan terus menerus dan proses berulang untuk menyediakan, berbagi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk merancang, melaksanakan dan mengevaluasi pengendalian internal, dan menilai efektivitas. Dengan kata lain informasi dan komunikasi ini adalah bentuk dari identifikasi, penangkapan dan pertukaran informasi dalam bentuk dan kerangka waktu tertentu sedemikian sehingga membuat orang-orang dalam organisasi mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik secara internal (ke seluruh level organisasi) maupun eksternal (kepada pihak yang berkepentingan).
Pemantauan (Monitoring)	adalah kegiatan untuk memastikan apakah masing-masing dari lima komponen pengendalian internal ada dan berfungsi. Setiap ditemukan adanya kekurangan harus dievaluasi dan dikomunikasikan secara tepat waktu kepada direksi.

Sumber : The 2013 COSO Framework & SOX Compliance, McNally, 2013

Kelima komponen tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, dilaksanakan di seluruh aktivitas dan level dalam organisasi, mulai dari yang terkecil hingga tingkat entitas. Hubungan 5

komponen pengendalian COSO dengan aktivitas organisasi dan level dalam organisasi diilustrasikan dalam Gambar 2.1



Gambar 2.1. Keterkaitan Antar Komponen COSO

Sumber : *The 2013 COSO Framework & SOX Compliance, McNally, 2013*

Dalam *Framework 2013*, COSO memperjelas kelima komponen tersebut dalam 17 prinsip yang menjadi syarat terbentuknya pengendalian internal yang Dalam *Framework 2013*, COSO memperjelas kelima komponen tersebut dalam 17 prinsip yang menjadi syarat terbentuknya pengendalian internal yang efektif dalam sebuah perusahaan, dimana dalam *framework* sebelumnya prinsip- prinsip tersebut hanya dijelaskan secara implisit. Tujuh belas prinsip tersebut dijabarkan dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Prinsip-prinsip Pengendalian COSO

Komponen		Prinsip
Lingkungan Pengendalian	1	Komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etis
	2	Independensi direksi terhadap manajemen dalam menjalankan Tugas
	3	Membuat struktur, garis pelaporan, otorisasi dan Pertanggungjawaban
	4	Komitmen pada kompetensi
	5	Mengembangkan akuntabilitas
Penilaian Risiko	6	Menetapkan tujuan dengan jelas
	7	Identifikasi dan analisa risiko yang mempengaruhi pencapaian Tujuan
	8	Menilai potensi risiko fraud
	9	Mengidentifikasi dan menganalisa perubahan yang signifikan
Aktivitas Pengendalian	10	Menetapkan dan mengembangkan aktivitas pengendalian
	11	Menetapkan dan mengembangkan aktivitas pengendalian umum atas teknologi
	12	Menerapkan pengendalian melalui kebijakan dan prosedur
Informasi dan Komunikasi	13	Memperoleh, menghasilkan dan menggunakan informasi berkualitas dan relevan
	14	Mengkomunikasikan secara internal
	15	Mengkomunikasikan secara eksternal
Pemantauan	16	Melaksanakan evaluasi berkala dan berkesinambungan
	17	Mengevaluasi dan mengkomunikasikan kelemahan defisiensi

Sumber : *The 2013 COSO Framework & SOX Compliance, McNally, 2013*

2.2.2.4 Penanggung Jawab Sistem Pengendalian Internal

Sesuai dengan definisi pengendalian internal dalam COSO 2013, di dalam sebuah organisasi, setiap orang menjadi bagian dan memiliki tanggung jawab terhadap pengendalian internal. Pihak eksternal seperti auditor independen dan badan pengatur (*regulatory body*) dapat membantu organisasi untuk menerapkan pengendalian intern dengan cara memberikan informasi dan melakukan evaluasi yang bermanfaat. Adapun pihak-pihak yang bertanggung jawab

terhadap pengendalian internal menurut COSO (2013) adalah sebagai berikut :

1. Manajemen
2. Dewan komisaris dan komite audit
3. Auditor internal
4. Seluruh karyawan
5. Auditor independen
6. Pihak eksternal lain

2.2.2.5 Keterbatasan Pengendalian Internal

Ada banyak faktor yang saling terkait dan mempengaruhi efektivitas pengendalian internal, seberapapun baiknya sistem pengendalian internal, selalu ada kemungkinan bahwa sistem pengendalian yang dibangun tidak berjalan sesuai harapan akibat adanya beberapa keterbatasan yang melekat pada sistem tersebut. COSO (2013) mengemukakan beberapa batasan pengendalian internal sebagai berikut :

“The Frameworks recognizes that while internal control provides reasonable assurance of achieving the entity’s objectives, limitations do exist. Internal control cannot prevent bad judgement or decisions, or external events that can cause organization to fail to achieve its operational goal.”

Dengan kata lain COSO membatasi bahwa pengendalian internal tidak dapat melindungi perusahaan dari keputusan yang buruk dan perubahan lingkungan eksternal. Sementara Mulyadi (2010) menguraikan batasan pengendalian internal meliputi kesalahan

pertimbangan, gangguan, kolusi, kecurangan, pengabaian oleh manajemen, serta biaya berbanding manfaat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal tidak ditujukan untuk menghilangkan semua risiko yang tidak diharapkan. Sistem pengendalian tidak dapat melindungi perusahaan dari masalah yang timbul akibat faktor kesalahan manusia dan perubahan lingkungan eksternal yang kurang menguntungkan perusahaan. Dengan berbagai keterbatasannya serta mempertimbangkan biaya dan manfaat, pengendalian internal hanya mampu memberikan keyakinan sampai tingkat tertentu, bahwa semua risiko tersebut telah dikurangi sampai ke level minimal yang dapat ditoleransi oleh perusahaan.

2.2.3 Akuntabilitas

2.2.3.1 Pengertian Akuntabilitas

Mckinsey dan Howard dalam (Akdon, 2011: 208) menyatakan bahwa, akuntabilitas merupakan suatu posisi dimana individu yang memiliki dan mempergunakan wewenangnya yang dapat dikendalikan, dan pada realitanya memang dibatasi oleh ruang lingkup penggunaan kekuasaan oleh instrumen pengendalian eksternal, termasuk sistem nilai internal yang berlaku dalam entitas yang bersangkutan. Dari segi akuntansi, akuntabilitas adalah upaya atau aktivitas untuk menghasilkan pengungkapan yang benar melalui proses-proses akuntansi (Mahlel, 2016)

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanah untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanah baik secara vertikal maupun secara horizontal. Lebih dari itu, akuntabilitas menyangkut pengelolaan keuangan dan kualitas output dan akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikan transparan kepada masyarakat. (Mardiasmo, 2009: 20)

Jadi dari pengertian yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan tanggungjawab yang diletakkan kepada penerima amanah dari pemberi amanah untuk mengelolah sumber dana sesuatu organisasi, dari perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan yang setiap pelaporannya dapat dipertanggung jawabkan kepada pemberi amanah. Lembaga Administrasi Negara (2007:57) dalam Badzlina (2014) memberikan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pelaksanaan prinsip akuntabilitas adalah sebagai berikut :

- a. akuntabel pengelolaan anggaran yang dikeluarkan
- b. pertanggungjawaban kinerja
- c. intensitas penyimpangan
- d. upaya tindak lanjut penyimpangan

2.2.3.2 Tujuan Akuntabilitas

Tujuan utama dari akuntabilitas adalah mendorong terbentuknya tanggungjawab untuk meningkatkan kinerja. Menurut Herbert, Killough dan Stretss dalam (Waluyo, 2013:197) manajemen suatu organisasi harus “Accountable” yang berguna untuk:

- a. Menentukan tujuan yang tepat.
- b. Mengembangkan standar-standart yang berguna untuk mencapai tujuan yang ditentukan.
- c. Secara efektif mempromosikan penerapan pemakaian yang sesuai dengan standar.
- d. Mengembangkan sebuah standar organisasi dan operasi secara praktis dan efisien.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan Akuntabilitas ialah membentuk kepercayaan (belief) dari stakeholder kepada pengelola keuangan, membuat koridor-koridor standart yang tepat untuk mencapai target yang ditetapkan guna memuaskan semua pihak yang berkepentingan .

2.2.4 Kecurangan (Fraud)

2.2.4.1 Definisi Kecurangan (Fraud)

Definisi fraud diungkapkan menurut the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dalam Badzlina (2014) :

“Perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi

ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain.”

Menurut KUHP Pasal 378, perbuatan curang sendiri adalah maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang (Tuanakotta, 2016)

Kecurangan merujuk pada Black Law Dictionary dalam Tungga (2010) merupakan kesengajaan atau salah pernyataan didalam suatu kebenaran ataupun keadaan yang disembunyikan dari fakta yang material dan dapat mempengaruhi individu lain untuk mengerjakan perbuatan atau tindakan yang bersifat merugikan, biasanya berupa kesalahan tetapi didalam beberapa permasalahan (khususnya dilakukan secara sengaja) memungkinkan merupakan bentuk kejahatan.

Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2001), memaparkan bahwa kecurangan akuntansi adalah sebagai berikut:

- a. salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan.

- b. Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat pada laporan keuangan yang tidak tersaji sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia

Sedangkan menurut Albrecht et al. (2012) mendefinisikan kecurangan sebagai berikut:

“Fraud is a generic term, and embraces all the multifarious means which human ingenuity can devise, which are resorted to by one individual, to get an advantage over another by false representations. No definite and invariable rule can be laid down as a general proposition in defining fraud, as it includes surprise, trickery, cunning and unfair ways by which another is cheated.”

Artinya “Kecurangan merupakan istilah generik, dan meliputi seluruh kecerdasan yang dapat dirangkai manusia, yang dipergunakan oleh seorang individu, guna mendapatkan profit lebih dengan keterangan palsu. Tidak ada pengertian dan kebijakan tetap yang dapat menjabarkan secara umum proporsi didalam pengertian kecurangan, karena yang termasuk didalamnya bisa berupa kecurangan, penipuan, kecerdasan dan beberapa cara lain yang tidak adil ialah penipuan.” Menurut Tunggal (2010), pelaku kecurangan dikelompokkan ke dalam dua kelompok yaitu karyawan atau pegawai dan manajemen. Manajemen melakukan kecurangan biasanya berupa kepentingan entitas dan pegawai melakukan kecurangan demi keuntungan pribadi.

Dari pengertian diatas yang bersumber dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa kecurangan adalah kesengajaan atau salah

pernyataan yang dilakukan pihak manajemen ataupun karyawan sehingga terdapat keadaan yang semestinya, yang mengakibatkan individu lain mengalami kerugian.

2.2.4.2 Jenis Kecurangan

Menurut the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dalam Kurniawati (2012) fraud diklasifikasikan menjadi 5 jenis, yaitu :

Tabel 2.4 Klasifikasi Fraud

Jenis Kecurangan	Korban	Pelaku	Penjelasan
Penggelapan uang atau kecurangan pekerjaan	Pegawai	Pemberi Kerja	Pemberi kerja secara langsung atau tidak langsung mengambil hak dari pekerjaannya
Kecurangan Manajemen	Pemegang saham	Manajemen tingkat atas	Manajemen tingkat atas memberikan penyajian yang salah, pada informasi keuangan
Kecurangan Investasi	investor	Individu	Individu menipu investor
Kecurangan Penyediaan/ Logistik	Pembeli barang atau jasa	Penjual barang atau jasa	Mengenakan biaya yang berlebih atas barang atau jasa kepada pembeli
Kecurangan Pelanggan	Penjual barang atau jasa	Pelanggan	Pelanggan meminta harga yang lebih kecil dari seharusnya

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) juga mengklasifikasikan fraud (kecurangan) dalam beberapa klasifikasi, dan dikenal dengan istilah "Fraud Tree"

1. Korupsi

Korupsi ialah penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai jabatan di instansi atau

perusahaannya. Korupsi adalah jenis kecurangan yang sukar untuk dideteksi, sebab korupsi melibatkan orang banyak. Didalam pohon kecurangan digambarkan dengan korupsi tersusun dari empat cabang utama, yaitu konflik kepentingan, penyuapan, penerimaan hadiah yang illegal dan pemerasan secara ekonomis.

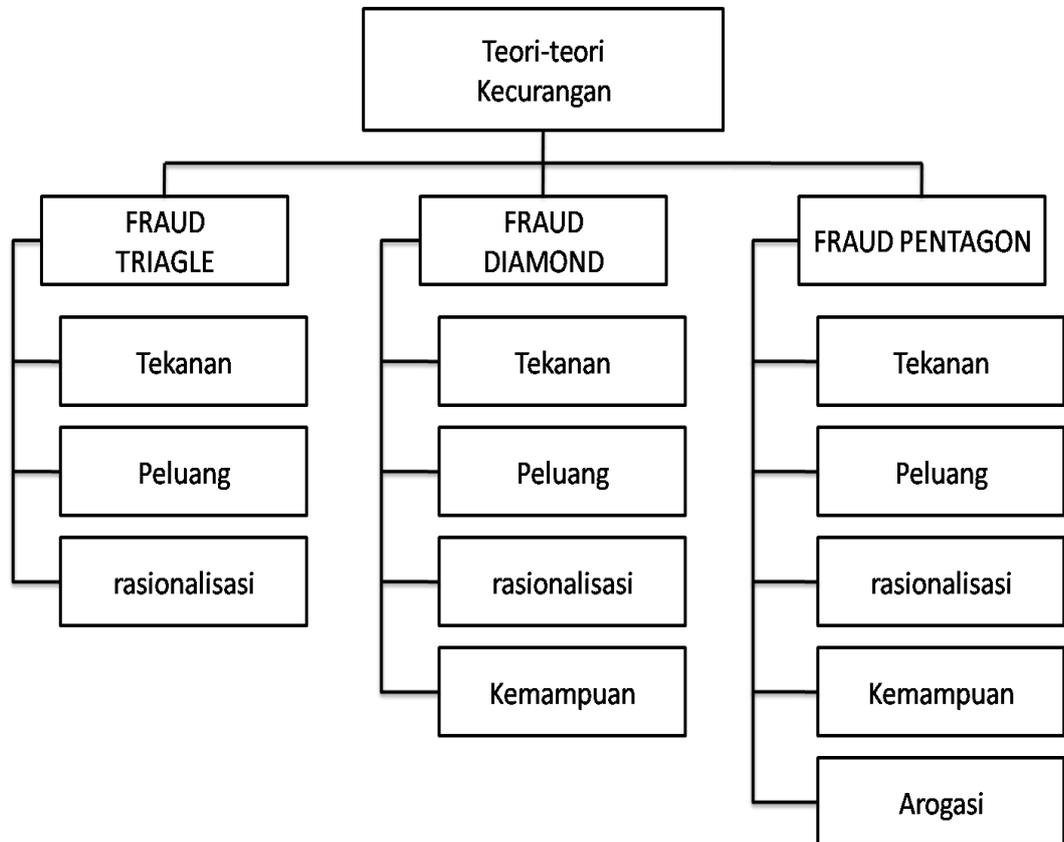
2. Penggelapan Aset

Penggelapan aset bermakna mencuri, mengambil, atau menyalahgunakan aset dengan illegal dan dilakukan oleh individu yang diberikan wewenang terkait mengelola aset. Transaksi yang melibatkan kas, perlengkapan, persediaan, peralatan, dan aset lainnya adalah aset yang paling rentan terhadap penyalahgunaan. Penyalahgunaan aset ialah salah satu contoh jenis kecurangan yang mudah dideteksi sebab bersifat tangible atau dapat diperkirakan dan dihitung.

3. Kecurangan Laporan Keuangan

Kecurangan terhadap Laporan Keuangan adalah tindakan kecurangan yang sifatnya disengaja didalam penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang bersifat umum sehingga membuat laporan keuangan menjadi terlihat baik. Didalam fraud laporan keuangan biasanya berhubungan dengan salah saji yang berkaitan dengan akun pendapatan atau aset.

2.2.4.3. Teori-Teori Kecurangan



Gambar 2.2 Teori-Teori Kecurangan

Sumber: Buku Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif (2012)
Wolfe dan Herman (2004) dan Crowe Horwath (2011)

a) Fraud Triangle

Fraud triangle berupa konsep yang dikemukakan Donald R. Cressey tahun 1953 yang menjabarkan tentang penyebab munculnya kecurangan (Tuanakotta, 2012). berdasarkan fraud triangle, terdapat tiga faktor yang menjadi penyebab terjadinya fraud yaitu tekanan, rasionalisasi, dan peluang.

b) Fraud Diamond

Fraud Diamond adalah teori yang kedua sebagai penyempurna dari teori fraud triangle. Fraud Diamond ada tahun 2004 yang dicetuskan oleh Hermanson dan Wolfe. Didalam fraud diamond, Hermanson dan Wolfe memunculkan elemen keempat yaitu berupa kemampuan. Menurut fraud diamond, ada empat faktor yang menjadi penyebab terjadinya fraud yaitu tekanan, rasionalisasi, peluang, dan kemampuan.

c) Fraud Pentagon

Fraud Pentagon adalah teori fraud yang paling baru didalam mendeteksi penyebab terjadinya kecurangan dan menjadi penyempurna dari fraud triangle dan fraud diamond. Fraud Pentagon dicetuskan oleh Crowe Howarth tahun 2011. Terdapat lima faktor yang menjadi pendorong terjadi kecurangan pada fraud pentagon, yaitu :

1. Tekanan

Kondisi dimana individu mempunyai tekanan dalam melakukan kecurangan, yang biasanya karena terdapat beban keuangan ataupun non keuangan. Konsep terpenting dari tekanan ialah bahwa individu memiliki sebuah kebutuhan yang bersifat mendesak (financial need), dan tidak dapat diberitahukan kepada individu lain (perceived non-shareable financial need) dalam (Tuanakotta, 2012).

Paling banyak tekanan muncul dari beban keuangan biasanya berupa gaya hidup, keserakahan ataupun tuntutan ekonomi disebabkan karena standar hidup terlalu tinggi. Selain itu, tekanan dapat berkaitan dengan beban non keuangan berupa tekanan yang berkaitan dengan pekerjaan, misal terdapat ketidakadilan diantara pegawai, stress akibat pekerjaan, kebutuhan atas hasil laporan yang lebih baik ketimbang dengan penampilan aktual, dan lain sebagainya yang dapat memicu terjadi sebuah kecurangan yang dilakukan pegawai guna memperoleh imbalan dari kerja kerasnya (Albrecht et al., 2012).

Tekanan juga bisa terjadi disebabkan target kerja dan tenggang waktu yang tidak masuk akal dari pihak manajemen pada karyawannya atau owner kepada manajemen yang mengakibatkan tekanan kepada karyawan atau manajemen dalam melakukan kecurangan laporan keuangan (Auditor of Public Accounts, 2011).

2. Peluang

Peluang merupakan kesempatan yang memungkinkan menjadi penyebab terjadinya sebuah kecurangan. Peluang bisa terjadi dikarenakan adanya persepsi karena lemah dalam pengendalian internal perusahaan, ketidakefektifan monitoring manajemen, dan penyalahgunaan wewenang atau otoritas.

Terdapatnya peluang ini disebabkan pelaku percaya terhadap aktivitas mereka dan tidak mungkin terdeteksi.

Priantara (2013) berpendapat jika terdapat dua faktor yang mampu meningkatkan peluang atau kesempatan terjadinya individu berbuat kecurangan yaitu

- a) Lemahnya Sistem pengendalian internal perusahaan , misalkan minim atau tidak terdapat jejak audit (audit trail) sehingga tidak bisa dilakukan sebuah penelusuran, ketidak efektifan dan ketidak cukupan pengendalian di area dan proses perusahaan yang berisiko. Termasuk didalamnya ketidak efektifan control karena terdapat kepercayaan yang berlebih yang diterima oleh pelaku kecurangan dari pemilik perusahaan ataupun atasan tidak tertip dan disiplin dalam menjalankan monitoring.
- b) Tata pengelolaan organisasi yang buruk seperti tidak terdapat komitmen tinggi dan suri tauladan yang baik dari jajaran manajemen, manajemen yang lalai, apatis, ataupun acuh dan tak acuh, gagal menertipkan atau memberi sanksi kepada pelaku kecurangan ataupun membiarkan pelaku tak etis atas kecurangan, terdapat peluang, yaitu kondisi entitas dan ketidak efektifan monitoring.

3. Rasionalisasi

Rasionalisasi adalah ketika individu membenarkan mengapa individu tersebut melakukan kecurangan (Auditor of Public Accounts, 2011). Pelaku kecurangan mempercayai atau merasa jika tindakannya bukanlah merupakan sebuah kecurangan melainkan bentuk haknya, bahkan terkadang pelaku merasa bahwa telah banyak berjasa untuk entitas.

Para pelaku mencari berbagai alasan yang bersifat rasional untuk membenarkan tindakan mereka, Karyono (2013) berpendapat jika

- a. pelaku kecurangan mencari pembenaran atas perilakunya antara lain Pelaku beranggapan jika yang kerjakan merupakan hal yang wajar dan dilakukan oleh individu lain juga.
- b. Pelaku merasa sangat berjasa terhadap entitas dan harusnya ia menerima lebih banyak menerima dari apa yang biasanya ia terima.
- c. Pelaku beranggapan bahwa tujuannya baik yaitu berguna dalam mengatasi masalah, dan nantinya akan dikembalikan kembali.

4. Kemampuan

Kemampuan merupakan keahlian pegawai untuk mengabaikan pengendalian internal, mengembangkan strategi

untuk penyembunyian, dan mengawasi keadaan sosial guna memenuhi kepentingan pribadinya (Horwath, 2011). Kecurangan tidak mungkin akan terjadi jika tanpa adanya individu yang tidak mampu mengenali peluang.

Banyak diantara kecurangan-kecurangan khususnya yang memiliki nominal yang besar tidak mungkin akan terjadi jika tidak ada individu tertentu dengan kemampuan tertentu didalam perusahaan. Peluang membukakan pintu untuk masuknya kecurangan dalam tekanan dan rasionalisasi yang membuat seseorang melakukan kecurangan.

Dalam penelitian yang dilakukan Horwath (2011) dikemukakan jika terdapat sifat-sifat yang mampu mempengaruhi kemampuan individu yakni function/position, confidence, intelligence, effective lying, coercive skills, immunity to stress.

a) Function / position

Fungsi yang dimiliki individu mampu membuatnya mudah dalam melakukan kecurangan. Posisi dan serta kekuasaan yang dimiliki

karyawan dapat menjadi jembatan menuju peluang fraud yang tidak tersedia untuk orang lain.

b) Intelligence

Seseorang yang tepat untuk melakukan kecurangan ialah orang yang cukup pandai jika untuk memahami dan memanfaatkan kelemahan atas pengendalian internal perusahaan dan menggunakan posisi untuk mengakses, fungsi, dan wewenangnya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya untuk diri pribadi.

c) Confidence

Orang yang memiliki kepercayaan (trust) dalam diri yang cukup besar jika ia tidak akan dideteksi jika melakukan kecurangan, atau jika seseorang percaya jika ia akan dengan mudah keluar dari masalah yang menjeratnya, dapat mendorong dirinya sendiri dalam melakukan fraud untuk keuntungan pribadinya.

d) Coercive skills

Pelaku fraud yang sukses ialah pelaku yang mampu memaksa pihak lain untuk melakukan fraud. Pelaku fraud ini merupakan individu yang mampu meyakinkan individu lain untuk bekerja sama didalam fraud.

e) Effective lying

Pelaku fraud yang sukses memerlukan kebohongan yang konsisten dan efektif. saat menghindari deteksi, seseorang harus bisa berbohong secara konsisten dan mampu

meyakinkan dan harus melacak kejadian secara keseluruhan.

f) Immunity to stress

Pelaku harus mampu mengontrol stress sebab menyembunyikan fraud dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan stress.

5. Arogansi

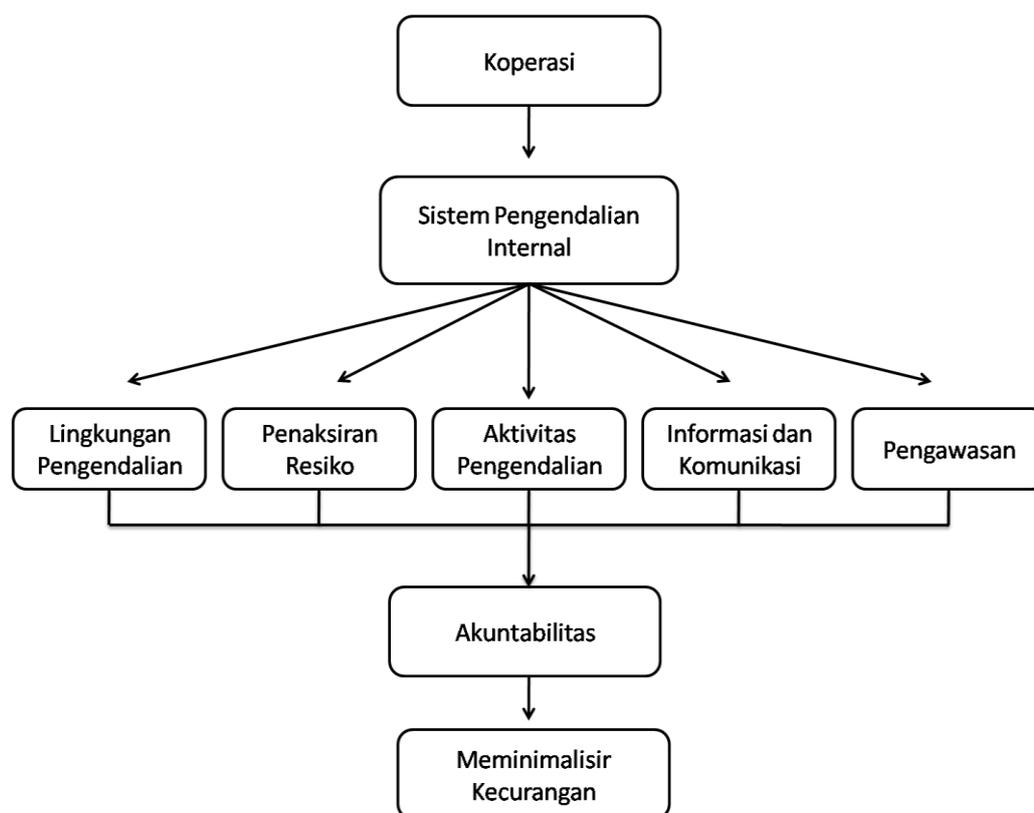
Crowe mengemukakan, arogansi merupakan perilaku superioritas dari hak yang dimiliki dan merasa jika kebijakan entitas atau pengendalian internal tak berlaku untuk individu tersebut. Horwath (2011) menyatakan jika terdapat lima elemen arogansi dari perspektif CEO, sebagai berikut:

- a. Ego yang besar dari CEO terlihat layaknya artis ketimbang seorang pengusaha.
- b. Mereka beranggapan jika internal control entitas tidak cukup berlaku untuk ia.
- c. Berkarakteristik sikap yang mengganggu.
- d. Bergaya kepemimpinan otoriter.
- e. Mempunyai ketakutan jika kehilangan jabatan.

Dari definisi diatassemuanya mempunyai satu tujuan yaitu berupa kepentingan pribadi dan ada pihak lain yang akan dirugikan. Jadi dapat disimpulkan jika Kecurangan merupakan perbuatan atau tindakan yang secara disengaja

menggunakan sumber daya entitas secara tidak semestinya guna memperoleh keuntungan secara pribadi sehingga membuat pihak dari organisasi merugi dan ataupun pihak lain dengan banyak faktor antara lain tekanan, peluang, rasional, kemampuan, dan arogasi.

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.3 Kerangka Konseptual

The Committee Of Sponsoring Organization Of Freedway Commettee (COSO), (COSO, 2013) yang beranggotakan AICPA dan FEI menjelaskan bahwa pengendalian internal merupakan proses yang mempengaruhi manajemen dalam memberikan pemikiran yang memadai untuk mencapai tujuan perusahaan melalui : Pencapaian efektifitas dan efisiensi dalam

kegiatan, (b) Keandalan dalam laporan keuangan, (c) Mentaati hukum dan peraturan.

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan indikator dari komponen Sistem Pengendalian Internal Menurut COSO (2013) dalam mengukur Sistem Pengendalian Internal, yaitu : Lingkungan Pengendalian, Penaksiran Resiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, terakhir adalah Pengawasan.

Lingkungan Pengendalian, merupakan Budaya perusahaan yang mempengaruhi cara organisasi menetapkan strategi dan tujuannya, membuat struktur aktivitas bisnis, dan mengidentifikasi, menilai serta merespon risiko, Penaksiran Resiko sendiri merupakan tahap mengidentifikasi, menilai, menganalisis, dan mengelola risiko apa saja yang mempengaruhi dalam tujuan perusahaan. proses yang paling kritis didalam menaksiran risiko ialah dalam mengidentifikasi dan penilaian perubahan keadaan internal dan eksternal dan mengidentifikasi apa saja tindakan yang dilakukan sebagai perbaikan.

Aktivitas pengendalian merupakan Prosedur atau sebuah kebijakan yang dapat memantau bahwa perintah yang diberikan manajemen benar-benar dikerjakan, selanjutnya adalah Informasi dan Komunikasi dalam sistem informasi sifatnya yang relevan terhadap tujuan laporan keuangan meliputi sistem akuntansi. Sistem akuntansi (*accounting system*) merupakan metode dan tahap untuk mengumpulkan, mengikhtisarkan, mengklasifikasikan, dan

melaporkan segala informasi yang berkaitan dengan operasi usaha dan keuangan.

Komunikasi mencakup pengadaan suatu pengetahuan atau interpretasi suatu tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan setiap perorangan yang berkaitan dengan pengendalian intern. Dan yang terakhir adalah komponen pengawasan Pemantauan merupakan suatu proses penentuan kualitas pengendalian intern setiap waktu. Pemantauan mencakup rancangan dan operasional pengendalian dengan ketepatan waktu dan tindakan perbaikan.

Jadi, dalam penelitian ini peneliti akan melihat kesesuaian sistem pengendalian internal didalam KPRI-Bahagia, sehingga dapat menciptakan sebuah informasi yang relevan dan handal yang dibuat oleh sumber daya manusia yang memiliki akuntabilitas tinggi agar informasi tersebut terhindar dari kesalahan sehingga dapat menimbulkan celah terjadinya sebuah kecurangan.

Akuntabilitas sendiri menurut Mckinsey dan Howard dalam (Akdon, 2011: 208) menyatakan bahwa, akuntabilitas merupakan suatu posisi dimana individu yang memiliki dan mempergunakan wewenangnya yang dapat dikendalikan, dan pada realitanya memang dibatasi oleh ruang lingkup penggunaan kekuasaan oleh instrumen pengendalian eksternal, termasuk sistem nilai internal yang berlaku dalam entitas yang bersangkutan

Lembaga Administrasi Negara (2007:57) dalam Badzlina (2014) memberikan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pelaksanaan prinsip akuntabilitas adalah sebagai berikut :

- a. akuntabel pengelolaan anggaran yang dikeluarkan
- b. pertanggungjawaban kinerja
- c. intensitas penyimpangan
- d. upaya tindak lanjut penyimpangan

Adanyapenurunan atau peningkatan akuntabilitas suatu organisasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya karena terjadinya kecurangan akuntansi di dalam suatu organisasi (Thoyibatun, 2012). Maka dari itu Sistem pengendalian internal menyediakan mekanisme guna mendeteksi keterjadian suatu kecurangan, baik saat kecurangan itu terjadi, akan terjadi, maupun sebelum terjadi (COSO, 2013).

Definisi fraud diungkapkan menurut the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dalam Badzlina (2014) :

“Perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain.”

Terdapat tiga jenis Kecurangan, yang paling terbaru adalah Kecurangan Pentagon (*Fraud Pentagon*). Fraud Pentagon adalah teori *fraud* yang paling baru didalam mendeteksi penyebab terjadinya kecurangan dan menjadi penyempurna dari fraud triangle dan fraud diamond. *Fraud Pentagon* dicetuskan oleh *Crowe Howarth* tahun 2011. Terdapat lima faktor yang

menjadi pendorong terjadi kecurangan pada *fraud pentagon*, yaitu : tekanan, rasionalisasi, peluang, kemampuan, Arogasi.

Tekanan, Konsep terpenting dari tekanan ialah bahwa individu memiliki sebuah kebutuhan yang bersifat mendesak (*financial need*), dan tidak dapat diberitahukan kepada individu lain (*perceived non-shareable financial need*) dalam (Tuanakotta, 2012). Peluang merupakan kesempatan yang memungkinkan menjadi penyebab terjadinya sebuah kecurangan. Peluang bisa terjadi dikarenakan adanya persepsi karena lemah dalam pengendalian internal perusahaan, ketidakefektifan monitoring manajemen, dan penyalahgunaan wewenang atau otoritas. Terdapatnya peluang ini disebabkan pelaku percaya terhadap aktivitas mereka dan tidak mungkin terdeteksi.

Rasionalisasi adalah ketika individu membenarkan mengapa individu tersebut melakukan kecurangan, Kemampuan merupakan keahlian pegawai untuk mengabaikan pengendalian internal, mengembangkan strategi untuk penyembunyian, dan mengawasi keadaan sosial guna memenuhi kepentingan pribadinya (Horwath, 2011). Kecurangan tidak mungkin akan terjadi jika tanpa adanya individu yang tidak mampu mengenali peluang. Crowe mengemukakan, arogansi merupakan perilaku superioritas dari hak yang dimiliki dan merasa jika kebijakan entitas atau pengendalian internal tak berlaku untuk individu tersebut.